

Foto: Fourt Gesang Soleh

Laporan Studi Lapangan

Suara Daerah: Implementasikan Pancasila Demi Tegaknya NKRI dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh Tim Redaksi

Pancasila semakin relevan digali kembali nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang. Beberapa persoalan dihadapi kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang penting mendapatkan pemecahan dari praktek etik politik bersumber dari Pancasila, diantaranya adalah masalah pembentukan negara kesejahteraan dan deradikalisasi agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera.

Negara kesejahteraan atau kebijakan pro-kesejahteraan rakyat penting dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Tantangan dihadapi tidak sedikit dalam soal ini ditengah berkembangnya liberalisasi ekonomi pasar melanda Indonesia sekarang. Logika ekonomi pasar berkembang mendorong peran negara dalam intervensi ekonomi perlu dikurangi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, logika pertumbuhan ekonomi ini mendapat penolakan dari logika ekonomi kesejahteraan. Pengurangan peran negara dalam intervensi ekonomi harus dilakukan karena akan mendorong kesenjangan sosial-ekonomi mengingat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada bekerjanya ekonomi pasar tetapi harus mendapatkan pengendalian dari negara terhadap ekonomi pasar sedang berlangsung.

Perdebatan ini kini tidak hanya sebatas pada persoalan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi telah masuk ke dalam perdebatan

politik. Mereka yang lebih condong ke ekonomi pasar mewarnai pandangan politik kelompok politik sayap kanan (*right wing*), yang di Indonesia seringkali dikenal dengan sebutan kelompok politik liberal. Sementara, mereka yang condong ke ekonomi kesejahteraan mewarnai pandangan politik kelompok politik sayap kiri (*left wing*). Perbedaan kedua pandangan ini tidak jarang mewarnai perdebatan politik dalam pengambilan kebijakan politik pembangunan, baik dikalangan legislatif maupun eksekutif.

Perbedaan pandangan idiologis ini tidak hanya berkembang di dalam lingkup politik formal dalam pengambilan kebijakan. Tetapi juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Seringkali ketika bersentuhan dengan keyakinan hidup beragama, perbedaan itu menimbulkan pertentangan antar kelompok kultural agama dan ekonomi sehingga mendorong munculnya radikalisme politik, baik radikalisme politik liberal maupun radikalisme agama dalam mempertahankan pandangan idiologi politik dan ekonomi.

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara penting mengatasi masalah ini dengan kembali pada prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Hikmat kebijaksanaan dan Keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam Pancasila, dalam penentuan kebijakan

pembangunan sosial dan ekonomi. Pancasila dijadikan acuan untuk menemukan jalan tengah melampaui kedua aliran ekonomi politik idiologi kanan dan kiri itu, atau meminjam istilah Anthony Giddens (1991) '*beyond left and right*', dengan melihat konteks kebutuhan dan visibilitasnya dalam dinamika sosial-politik berkembang sekarang.

Melampaui aliran ekonomi politik kanan dan kiri ini cukup beralasan, karena dalam praktek sesungguhnya tidak ada kebijakan menggunakan pendekatan murni ekonomi pasar bebas sebagaimana dibayangkan ekonomi liberal. Karena aliran politik kanan atau pendekatan ekonomi pasar pun dalam banyak kasus melakukan revisi dengan mempertimbangkan aspek atau dimensi kesejahteraan kesejahteraan, sebagaimana dipraktekkan aliran politik kanan baru (*new right*). Sebaliknya, tidak ada pendekatan murni ekonomi politik kiri, terutama sejak kegagalan negara sosialis di Eropa Timur tahun 1980an, tanpa mempertimbangkan visibilitas peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejak itu, muncul pendekatan baru disebut aliran kiri baru (*new left*), dengan tetap menekankan pentingnya peran negara menambahkan dimensi kebebasan dan kesetaraan bagi setiap warga negara, sebagaimana dianut ekonomi politik liberal, dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam pembangunan (Mouffe,

2005).

Prinsip hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial dalam Pancasila penting untuk menjawab masalah ini dan menemukan relevansi dan visibilitasnya untuk menemukan jalan ketiga ekonomi politik melampaui kedua pandangan tersebut. Kebijakan melampaui pendekatan ekonomi pasar, dengan melakukan revisi fundamental atas pendekatan ekonomi pasar, dengan tetap mempertahankan peran negara untuk menjamin kepastian pemenuhan hak-hak warga negara dalam pembangunan untuk bekerjanya ekonomi pasar, merupakan pilihan moderat dalam praktek kebijakan ekonomi politik (Bates, 1991). Dimensi penting menyebabkan terjadinya kovergensi kedua pendekatan itu adalah masalah keadilan harus dicapai dalam kebijakan pembangunan. Dimensi hak-hak warga negara dalam pembangunan menjadi pertimbangan penting dalam pencapaian keadilan ini. Selain untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan dalam pembangunan, hal itu penting untuk memastikan pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam praktek politik demokrasi.

Praktek politik pembangunan berlandaskan etika politik demokrasi dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak warga negara ini juga bisa untuk membendung radikalisme fundamentalisme pasar dan

fundamentalisme agama sebagai imbas pertentangan idiologi politik kedua aliran ekonomi politik pembangunan tersebut. Deradikalisasi terutama diarahkan dengan menjadikan etik politik demokrasi dan keadilan sosial dalam praktek pembangunan sosial dan ekonomi politik. Dalam hal ini, praktek pembangunan berdimensi etika sosial menekankan pentingnya dimensi sosial dalam praktek keagamaan penting ditekankan. Keyakinan idiologi dalam hal ini tetap diakui, namun dalam praktek sosial di dunia publik perbedaan sebagai keniscayaan kehidupan sosial harus diakui, bahkan harus diperjuangkan bersama untuk mencapai kebaikan publik. Demikian pula, praktek etika politik demokrasi penting dikembangkan, yaitu mengakui perbedaan pandangan dan memberikan peluang politik berbagai perbedaan pandangan mengartikulasikan diri dalam praktek politik demokratis. Kedua etik politik yang begitu sarat makna terkandung dalam Pancasila itu harus dikembangkan sebagai rumah paling ideal untuk berkembangnya etik politik demokrasi dan menjunjung tinggi keadilan sosial dalam pembangunan sosial-ekonomi. Etik politik demokrasi dan keadilan sosial itu harus diwujudkan dalam pembentukan subjek-subjek warga negara demokratis mengisi pembangunan negara dan bangsa moderen Indonesia yang

demokratis.

Indonesia kemudian memasuki babak baru yang sering disepakati memasuki era reformasi. Konstelasi politik pun berubah, dari sistem pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara besar yang menganut sistem pemerintah demokratis. Akan tetapi pada era demokratisasi ini Pancasila justru menjadi tidak populer, dan bahkan cenderung dilupakan, sehingga banyak yang menilai bangsa ini sedang mengalami krisis identitas atau jati diri. Mengapa Pancasila sekarang tidak mampu menjadi identitas diri bangsa di tengah arus perubahan masyarakat?

Menurunnya pamor Pancasila sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Pemerintah sendiri semakin menyadari bahwa Pancasila yang merupakan falsafah dan mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia sekarang makin tidak populer. Dalam dunia politik yang diwarnai dengan praktik vulgar aksi politisi yang tidak mengindahkan sopan-santun politik, menjadi salah satu indikator betapa Pancasila sudah bukan lagi menjadi etika politik. Saling caci maki, saling mencera, jegal-menjegal, intrik, dan menang sendiri, senantiasa dalam praktik politik di kalangan elite. Sementara

itu di kalangan masyarakat akar rumput pun, aksi-aksi politik yang anarkis juga terus berlangsung seolah lupa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki falsafah politik santun, yaitu Pancasila.

Bersamaan dengan itu, berbagai ideologi lain yang mencoba masuk dalam struktur kesadaran warga bangsa Indonesia juga terus mengalir seiring dengan pudarnya peran ideologi negara, yaitu Pancasila. Gerakan ideologis yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti gerakan Negara Islam Indonesia (NII), dan gerakan separatis baik di Indonesia Barat maupun Timur terus bergerak secara eskalatif. Sementara itu gerakan-gerakan ideologis yang mendengarkan liberalism dan neoliberalisme melalui pasar bebas dan globalisasi terus mengancam identitas bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Memperhatikan gejala sosial politik seperti itu, kiranya menarik untuk mencermati seberapa jauh tingkat pemudaran ideologi Pancasila di kalangan warga bangsa, baik kalangan muda maupun tua sekarang ini. Di samping itu, menarik pula diketahui bagaimana urgensi dan relevansi Pancasila menurut pandangan warga masyarakat, dalam menghadapi permasalahan mendasar bangsa Indonesia sekarang ini. Upaya menjadi bangsa yang berkarakter mandiri, toleran, jujur,

kreatif, inovatif, dan percaya diri sebagaimana yang menjadi program utama pemerintah sekarang ini, bisa jadi sumber utamanya adalah terdapat dalam revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka studi lapangan ini akan mencoba mengeksplorasi pendapat, gagasan, dan harapan warga masyarakat terhadap ideologi Pancasila, dikaitkan dengan upaya membangun bangsa yang berkarakter. Usaha ini sangat penting dalam rangka pemerintah mencari solusi konstruktif, menjadi bangsa yang berkarakter, sejahtera, dan demokratis.

Lokasi studi lapangan ini meliputi Banda Aceh, Tasikmalaya, Pontianak, Madiun, Ambon, dan Kupang. Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa di samping mewakili perimbangan kewilayahan Indonesia barat, tengah, dan timur, juga atas dasar pertimbangan riwayat historis dan indeks politik kedaerahan. Aceh, Tasikmalaya, Madiun, dan Ambon mewakili daerah yang memiliki riwayat historis berkaitan dengan keutuhan NKRI. Sedangkan Pontianak dan Kupang merupakan daerah yang meskipun di pinggiran perbatasan tetapi selama ini memiliki kohesifitas politik tinggi dilihat dari upaya keutuhan NKRI.

Kupang: Masyarakat Masih Rindu Pancasila

Meskipun harus diakui bahwa dalam era reformasi sekarang ini demokrasi dalam tataran formal semakin meningkat, tetapi semua itu tidak berarti harus meninggalkan Pancasila. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bukan berarti kembali ke era Orde Baru di mana Pancasila ketika itu lebih cenderung dijadikan sebagai instrumen politik demi memapankan kekuasaan sebuah rezim. Emy Nomlenny, anggota DPR Provinsi NTT, menjelaskan bahwa kebebasan berpolitik memang bagian dari proses demokrasi tetapi tidak berarti meninggalkan ideologi Pancasila. Harus menyadari sejak awal bahwa Indonesia ini merupakan negara plural, karena itu Pancasila yang paling tepat sebagai ideologi bangsa. Dulu pada era Orde Baru, Golkar, PDI, dan bahkan PPP yang berbasis massa Islam menyatakan diri berideologi Pancasila. Tetapi sekarang ini orientasi ideologi parpol tidak jelas. Kecenderungan ini jika dibiarkan akan mengarah pada pengingkaran bahwa Indonesia merupakan negara yang plural. Ini akan menimbulkan masalah di masa depan, terutama soal persatuan dan kesatuan bangsa", katanya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yusuf Kauhaki, Dosen Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang, yang mengatakan bahwa pada masa Orde Baru penekanan

pada ideologi Pancasila sangat kuat pada organisasi kemasyarakatan, parpol, bahkan termasuk pada ormas keagamaan. Waktu itu berkembang persepsi dalam masyarakat bahwa Pancasila sebagai ideologi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara pada era reformasi sekarang ini masyarakat memahami Pancasila berdasarkan persepsi mereka masing-masing. Peran negara sangat kecil, sehingga masyarakat berusaha memahami sendiri berdasarkan realitas yang mereka alami berkaitan dengan kondisi bangsa termasuk kondisi konflik, sehingga Pancasila seolah tidak ada, artinya nilai itu tidak diamalkan. Di sisi lain masyarakat tidak menemukan satu ideologi yang bisa diterima bersama, sehingga saat ini mulai ada kerinduan untuk kembali kepada Pancasila. "Pada warga masyarakat NTT, kerinduan akan Pancasila semakin terasa, karena pada prinsipnya nilai-nilai yang terkandung Pancasila itu terus hidup laten seperti rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan", katanya.

Sementara itu, aktivis LSM Laskar Merah Putih, Melkiyanus Nona berpendapat bahwa masalahnya bukan soal menarik atau tidak, tetapi Pancasila itu sudah merupakan komitmen bangsa, sehingga semua tingkah laku bangsa ini harus berdasarkan pada Pancasila. Karena landasan dan falsafah bangsa ini tidak dilakukan secara benar, maka bangsa ini selalu dilanda berbagai krisis. Pemimpin dan para elite kurang

memiliki komitmen pada nilai-nilai Pancasila. Contoh, timbul gerakan separatisme buka karena masalah pro kontra Pancasila, tetapi lebih karena kecemburuan sosial. Pembangunan yang dianggap tidak adil, karena banyak daerah yang tertinggal. Kata kuncinya adalah kurang diperhatikan faktor Nation and character building (NCB). "Sebagian besar politisi perilakunya tidak berlandaskan pada Pancasila. Bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan, hampir tidak menemukan orang yang antusias berbicara tentang persoalan dari perspektif kebangsaan, tetapi lebih mementingkan kelompok. Sebagai contoh ketika menyelesaikan kasus Nazaruddin para politisi tidak melihatnya sebagai persoalan fundamental dalam konteks membangun Nation and Character Building, tetapi terjebak pada kepentingan kelompok dan politik semata", tegasnya.

Sedangkan Uskup Petrus Turang yang juga Ketua Paoki Gereja Kristen Katolik NTT mengutarakan bahwa pudarnya Pancasila karena para politisi memang kurang mampu secara konsekuen mengimplementasikan dalam kebijakan yang mensejahterakan dan memberikan rasa keadilan sosial bagi warga negara. Akibatnya banyak tuntutan dari berbagai masyarakat yang pada intinya merasa diperlakukan tidak adil. Jika para politisi mampu mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila, maka akan menghilangkan semua bentuk reaksi masyarakat seperti sparatisme, radikalisme, agama, dan termasuk tuntutan menjadi negara Islam itu dengan sendirinya akan pudar”, ungkapnya.

Selanjutnya Petrus mengungkapkan Pancasila merupakan dasar negara, karena itu untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila. Sementara ada ketentuan yang memberi keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama bagi pemeluknya. Ketuhanan harus terbangun berdasarkan keyakinan masing-masing. Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan keyakinan. Pencegahan setiap praktek yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat harus dengan dialog, bukan dengan kekerasan dan tindakan radikal. Kalau sudah dialog tetapi tidak digubris, maka harus memperluas jaringan sebagai tekanan agar mendapat tanggapan. Sedangkan Ahmad Yani, Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Kupang berpendapat bahwa hubungan agama dengan Pancasila seharusnya diposisikan agama masuk dalam Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia merupakan instrumen negara dalam mengatur

kehidupan waganya, termasuk agama di dalamnya. Sementara itu Adam Asrakal, Wakil Ketua MUI Provinsi NTT berpendapat bahwa sebenarnya isu negara Islam bukan hal baru bagi Indonesia. “Sebenarnya tidak diperlukan negara Islam, tetapi yang perlu dikembangkan adalah negara menggunakan sistem Islam. Bagaimana setiap agama memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dalam kaitan itu MUI lebih konsern pada umatnya, termasuk para elit muslim”, ungkapnya.

Terkait dengan semakin menurunnya popularitas Pancasila di kalangan generasi muda, Petrus menjelaskan bahwa semua itu disebabkan derasnya nilai-nilai luar baik liberalisme, kapitalisme, dan bahkan termasuk aliran agama. Oleh karena itu sosialisasi Pancasila perlu dilakukan terus. “Sosialisasi yang paling utama adalah melalui keteladanan para pejabat publik. Diperlukan contoh contoh konkrit, seperti kalau sekolah rusak, jangan cuma bicara tetapi langsung bertindak memeperbaiki. Selain itu perlu melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah untuk mencintai Pancasila sebagai pencerahan dan bukan sekadar sebagai ideologi”, katanya. Pendapat serupa juga diungkapkan Adam Asrakal, Wakil Ketua MUI Provinsi NTT, sosialisasi dan internaslisasi nilai-nilai Pancasila perlu dimasukkan melalui kurikulum sekolah, dan melalui lembaga-

lembaga sosial. Tidak kalah penting adalah perlu keteladanan dari para pemimpin dan elite politik. Sedangkan menurut Pimus Embala, jika mau efektif dalam sosialisasi, maka pemerintah perlu membuat badan lagi semacam BP7 di era Orde Baru. Di samping itu, peran Kemkominfo sangat strategis dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Demikian pula Melkiyanus berpendapat bahwa prinsipnya sosialisasi Pancasila model P4 dulu masih relevan dilakukan sekarang, tetapi tentu dengan bentuk yang berbeda dan simbol-simbol yang digunakan juga berbeda. Fungsi itu sebenarnya ada pada Kementerian Kominfo, tinggal bagaimana melibatkan semua unsur dalam masyarakat agar lebih cepat dan lebih efektif.

Berkait dengan sistem ekonomi, hampir semua informan di NTT menegaskan bahwa kuncinya terletak pada terlalu kuatnya pengaruh liberalisasi ekonomi. Pemerintah kurang memiliki sepirit kuat dalam mengimplementasikan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ahmad Yani, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang, berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena terbukti masih banyak orang miskin dan pengangguran. "Kalaupun toh merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, atau katakanlah sistem

ekonomi Pancasila, persentasenya hanya baru 25%, sedangkan 75% masih liberal kapitalis. Pemerintah seharusnya lebih konsern pada pembangunan ekonomi yang sesuai dengan Pancasila, yaitu ekonomi kerakyatan", katanya.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Pimus Embala, Kepala Bidang Fasilitasi Politik dan Kajian Masalah Strategis, Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia belum Pancasila, masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila. Seharusnya yang dibangun itu ekonomi kerakyatan dan mengutamakan asas pemerataan, tetapi dalam prakteknya ekonomi rakyat semakin terpukul dan rakyat terus miskin. Para elite pemerintahan baik di daerah maupun di pusat yang seharusnya menjadi abdi rakyat justru lebih memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dari pada kesejahteraan rakyat. "Memang ada beberapa program untuk membangun ekonomi rakyat, seperti kredit lunak untuk pengusaha kecil dan menengah, bantuan modal bergulir dan sejenisnya, tetapi perencanaannya tidak matang sehingga tidak efektif. Masyarakat sendiri kurang siap, dan tidak dilakukan semacam pendampingan, sehingga sebagian besar tidak produktif bahkan tidak jelas kelanjutannya. Komitmen pada nilai-nilai Pancasila masih sangat kurang sehingga dalam prakteknya lebih pada liberal

kapitalisme', ungkapinya. Demikian pula Emy Nomlenny berpendapat bahwa sistem ekonomi kita kurang menggambarkan ekonomi Pancasila. "Kita terjebak dengan nilai-nilai dari luar yang dianggap lebih baik, padahal sebenarnya punya kita lebih bagus. Seperti program bantuan sebenarnya menunjukkan bentuk ekonomi kerakyatan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak serius. Sebenarnya bahasanya bukan memberi bantuan, tetapi lebih pada pemberdayaan dan penguatan. Jadi bukan memberi tapi merupakan tanggung jawab", tegasnya.

Sementara itu Yusuf Kauhaki juga mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini betul-betul liberal kapitalis. Perlakuan pemerintah terhadap rakyat sendiri kurang memenuhi harapan untuk sejahtera. Betapa silitnya rakyat mendapatkan modal usaha sendiri, sementara ada pihak yang mendapatkan modal besar dengan cara yang mudah. Tidak ada satu pun desain program pembangunan ekonomi yang pas untuk masyarakat kita yang lemah saat ini. Demikian pula Hamzah Wulakada, Sekretaris DPD KNPI Provinsi NTT, mengutarakan bahwa harus diakui sistem ekonomi Indonesia saat ini lebih liberal kapitalis dari pada Pancasila. Hasrat untuk memiliki asset ekonomi dianggap manusiawi, karena setiap orang punya nafsu dan bebas untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya kesenjangan

sosial masih sangat lebar, sehingga ada yang sangat kaya, tetapi sebagian besar warga masyarakat masih miskin dan bahkan ada yang sangat miskin seperti banyak dijumpai di NTT ini. Seharusnya jika memang mau menerapkan sistem ekonomi Pancasila, maka koperasi harus benar-benar menjadi soko guru perekonomian nasional. "akan tetapi pada kenyataannya, koperasi yang sering didengungkan sebagai ciri ekonomi Indonesia kurang berkembang seperti diharapkan, selalu kalah bersaing dengan pelaku ekonomi liberal yang kapitalistik", tegasnya.

Ambon: Kearifan Lokal Kikis Radikalisme

Konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku pada tahun 1998-2002 menyisakan luka yang dalam bagi masyarakat Kota Ambon, serta menyuramkan masa depan rakyat Maluku. Selain menimbulkan korban jiwa dan harta peristiwa tersebut juga membahayakan keutuhan negara RI. Selain *peran* tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila ikut berperan dalam meredakan konflik tersebut. Nilai-nilai kerarifan lokal dalam masyarakat Maluku tersebut adalah semangat *Pela Gandong*.

"Konflik sosial yang melanda Maluku 10 tahun lalu tak akan selesai jika semangat *Pela Gandong* absen

dalam proses rekonsiliasi. *Pelagandong* terus hidup dan semakin merekatkan rasa persaudaraan," jelas Max Someaputty, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan kota ambon. *Pela Gandong* sendiri merupakan sebuah nilai kearifan lokal, yang merupakan ikatan kekerabatan yang dibangun oleh para leluhur atas sumpah persaudaraan dan garis darah yang berbeda agama.

Pela Gandong bukan sekadar warisan masa lalu. Saat ini, masyarakat Maluku menempatkan *Pela Gandong* dalam konteks yang lebih modern, ditambah dengan semangat nasionalisme. "Nilai-nilai tersebut merupakan unsur-unsur kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila dan akan terus melekat dalam kehidupan masyarakat," lanjut Max.

Meski demikian Max merasa resah dengan semakin kendurnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Pada saat ini budaya, moral, dan karakter bangsa Indonesia tengah terpuruk. Nilai-nilai pancasila sepertinya sudah luntur dalam masyarakat kita, itu terlihat dari maraknya pelaku tindakan korupsi, kekerasan, dan kendurnya nasionalisme." Jelas Max. Oleh karena itu perlu membentuk karakter Bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak usia dini melalui dunia pendidikan. "Dinas pendidikan Kota Ambon memperkuat pendidikan budaya dan

karakter bangsa sejak dari usia dini, pendidikan budaya dan karakter bangsa ini tidak hanya dievaluasi lewat angka-angka dalam mata pelajaran, tetapi melalui sikap yang diperlihatkan anak didik dalam semua mata pelajaran, bahkan pelajaran matematika, ini berliku mulai dari SD sampai SMA, siswa dituntut tidak hanya pintar, melainkan juga harus memiliki nilai-nilai pekerti yang luhur," tambah Max.

Ketika ditanyakan apakah melalui pendidikan karakter tersebut akan mampu mencegah gerakan radikal agama yang muncul dari sekolah atau kampus yang saat ini mulai marak Max menjawab "Pendidikan karakter tersebut merupakan salah satu langkah dalam mencegah munculnya bibit-bibit radikalisme, dengan menanamkan karakter sejak dari usia dini diharapkan memiliki pondasi karakter yang kuat akan memiliki ketahanan terhadap ancaman paham-paham dan ideologi radikal," Max menambahkan "Tapi tentunya selain dari kami juga ada dukungan seluruh komponen masyarakat dan lingkungan keluarga".

P Lekatompesy, S.Sos, Kepala Bagian Humas dan Protokol kota Ambon juga membenarkan ucapan Max Someaputty. Nilai-nilai nasionalisme tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Ambon. "Nilai-nilai nasionalisme diamankan dengan

baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setiap hari Senin siswa di semua sekolah dari SD, SMP dan SMA selalu mengadakan Upacara Bendera dan membaca Pancasila," jelasnya.

"Tidak ada gerakan radikal atau kelompok garis keras di Ambon, keadaan Ambon aman dan kondusif," yakin P Lekatompessy. Lekatompessy juga menambahkan bahwa suasana kondusif ini sangat membantu iklim investasi. "Bapak bisa lihat investasi mulai membaik, mulai dari perikanan, pariwisata, ada juga agen perumahan serta pasar swalayan yang masuk dan berinvestasi, diharapkan dengan investasi tersebut mampu menggerakkan perekonomian,".

Di sektor pariwisata beberapa event telah sukses digelar tidak hanya regional melainkan juga internasional. "Tahun lalu ada event Sail Banda 2010, kemudian Darwin-Ambon Yacht Race yang mulai digelar lagi sejak tahun 2007 setelah pernah terhenti akibat terjadi konflik" P Lekatompessy.

Bank Indonesia (BI) Cabang Ambon menyatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku semakin membaik dan diperkirakan akan tumbuh mencapai 6,5 persen pada tahun 2011. "Pertumbuhan ekonomi Maluku terus mengalami peningkatan mulai dari 2009 sebesar 5,43 persen meningkat menjadi 6-6,3 persen tahun 2010 dan tahun 2011

diperkirakan mencapai 6,5 persen," kata Pemimpin BI Cabang Ambon, Achmad Bunyamin. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku, menurut Bunyamin, karena kondisi keamanan semakin kondusif dan aman serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang semakin membaik juga diungkapkan M Rakalahu, pedagang pakaian di sekitar Ambon Plaza bercerita bahwa pertikaian yang pernah terjadi membuatnya terusir dari rumahnya sendiri dan ia terpaksa mengungsi. Tapi kini setelah kondisi keamanan membaik ia bisa merasa nyaman dalam menjalankan usahanya. "Peristiwa tersebut membuat *katong* tercerai-berai, mari saling menghormati dan menghargai, perpecahan membuat semua orang menderita" ujarinya berharap.

Arman wartawan koran lokal Info Baru Ambon mengatakan saat ini toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik, "Perbedaan agama hanya sebatas pagar halaman rumah ibadah. Keluar dari pagar rumah ibadah, semua sama dan satu, warga negara Indonesia," kata alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Pattimura itu. "Banyak kearifan lokal yang masih bisa kita temui sampai sekarang, contohnya acara makan *Patita* (makan bersama) adalah acara khas wilayah ini untuk menunjukkan adanya bingkai

kekeluargaan didalam masyarakat. Pada acara ini, siapa pun yang hadir bisa menikmati makanan yang tersaji. Tradisi ini masih dipelihara di desa-desa dan kota-kota di Maluku." Ia menambahkan "Dalam acara itu, tanpa membedakan latar belakang agama dan kelompok, warga membaur tanpa membedakan status sosial, agama dan keturunan. Sebelum makan, mereka menari bersama dengan iringan musik tradisional sambil berkenalan dengan lainnya,".

Pancasila melalui nilai-nilai yang digali dari kearifan lokal akan terus bertahan di negeri ini selama masyarakat tidak melupakan dan selalu mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pontianak: Tetap Populer

Pontianak merupakan kota yang membentang pada garis katulistiwa, dandalamperkembanganselanjutnya kota ini semakin hiterogen. Dilihat dari segi etnis, kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya, terdiri dari suku Dayak, Melayu, dan Jawa, serta Cina keturunan. Oleh karena itu persoalan persatuan, kerukunan, dan perdamaian menjadi amat penting. Terlebih lagi ketika terjadi masa transisi politik, yaitu pada tahun 1999, di wilayah ini konflik berlatar belakang etnis sangat tajam dan eksplosif.

Boleh jadi karena heterogenitas yang dibayangi oleh trauma konflik

antaretnik, masyarakat Pontianak semakin memerlukan Pancasila sebagai pemersatu, dan karena itu Pancasila masih sangat populer. "Pancasila tidak populer itu kan mungkin di daerah lain, khususnya di Jakarta. Akan tetapi kalau di Pontianak Pancasila masih tetap populer", tegas Yuniarlita, Kepala Humas Pemerintah Kota Pontianak. Lagi pula wacana ketidakpopuleran Pancasila itu mungkin juga hanya konstruksi media di Jakarta. Di Pontianak tidak demikian halnya, Pancasila tetap bergema hampir di semua instansi pemerintah dan di kalangan pelajar.

Upacara bendera terus dilakukan secara rutin, dan dalam serimonial itu senantiasa ada pembacaan teks Pancasila. Mereka yang bertuga sebagai pembaca Pancasila merasa bangga dan cinta tanah air. "Bahkan pada setiap bulan Juni senantiasa ada lomba Pembacaan teks Pancasila yang diselenggarakan baik di sekolah maupun di instansi pemerintah", kata Yuniarlita. Yang menarik adalah bahwaseringkali yang memenangkan lomba Pancasila itu adalah dari kalangan etnis keturunan Cina.

Pancasila harus tetap ditegakkan kata Lily seorang wirausaha di bidang kuliner bersemangat. "Pancasila adalah dasar negara yang paling pas untuk Indonesia yang hiterogen ini. Karena itu jangan ada upaya untuk menggantinya", kata Lily berharap. Dengan Pancasila memungkinkan

kita hidup lebih rukun dan berbaur. Dulu di Pontianak menurut Lily antara-etnik kurang begitu berbaur, tetapi sekarang sudah semakin cair hubungan sosial di antara etnis yang ada. "Bahkan kawin campur antaretnis sekarang juga mulai banyak terjadi", ungkapnya. Hanya dengan Pancasila semua itu bisa terjadi, sehingga Pancasila tetap perlu dipopulerkan pada generasi sekarang, terutama di kalangan terpelajar. Lily yang bermukim di pusat keramaian kota Pontianak itu mendemonstrasikan bahwa dia hafal Pancasila.

Sebagai masyarakat plural maka wajar jika Pontianak memiliki potensi konflik sosial yang tinggi, sehingga sangat sensitif terhadap masalah kerukunan dan keamanan. Dapatlah dipahami jika kerukunan antaretnis dan akhirnya juga antaragama serta antarbudaya menjadi tujuan utama di daerah ini. Karena itu mereka membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum strategis untuk mengantisipasi dan mencari solusi konflik. Anggota forum ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan. Pemkot Pontianak senantiasa menggunakan forum ini sebagai arena komunikasi politik dalam upaya menjaga keamanan dan perdamaian.

Tokoh utama dalam FKUB terdapat juga dari kalangan etnik Tionghoa seperti Franky Song dan

Pendeta besar di Gereja Katedral. "Melalui FKUB segala permasalahan yang berkaitan dengan berbagai upaya menjaga perdamaian di Pontianak dapat bicarakan bersama. Komunikasi senantiasa dilakukan oleh para tokoh untuk duduk bersama membicarakan segala hal yang mengarah pada harmoni kehidupan", katanya. Sementara itu Manto Saidi, salah seorang anggota FKUB Kalbar memberikan keterangan bahwa forum silaturahmi antartokoh sangat penting dilakukan guna menciptakan saling pengertian demi menjaga perdamaian. "perbedaan hidup umat beragama adalah karunia Tuhan kepada manusia, sehingga perbedaan itu adalah rahmat karena itu tidak boleh dieksploitir sisi perbedaannya yang hanya akan membuat konflik", katanya.

Dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kalbar, FKUB senantiasa bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan berbagai kegiatan untuk pembinaan umat beragama. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi, kehidupan umat beragama merupakan satu di antara faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. "Ketika masyarakat beragama hidup rukun dan damai dalam menjalani kesehariannya di lingkungan masing-masing, akan tercipta kondisi kondusif dan tentram, sehingga pembangunan akan berjalan lancar",

tegasnya. Selanjutnya Paulus kerukunan dapat terwujud apabila masing-masing umat beragama dan kelompoknya mau mau menyadari dan menerima berbagai kelebihan dan kekurangan kelompok atau umat berada yang berbeda. Sebab pada hakekatnya perbedaan adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Tentang masalah kerukunan antarumat beragama tampak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pontianak, dan Kalbar pada umumnya. Sebagai indikator misalnya telah diterbitkan Surat Edaran Nomor: SE/01/V/2011 tentang Himbauan Bersama Kapolres Kota Pontianak dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dalam rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Kerukunan Umat Beragama. Isinya meliputi: (1) Menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dengan siskamling dan mengaktifkan kemabali wajib lapor 1 kali 24 jam bagi pendatang; (2) Tidak menjadikan fanatisme agama sebagai alasan untuk berbuat anarkis yang menyebabkan perpecahan umat agar tidak menjadi pelaku teror bom dan tindak kejahatan lainnya; (3) Menjaga kerukunan umat beragama berperan dalam pengamanan dan penyelesaian antarumat di lingkungannya; dan (4) Sadar hukum dan patuh hukum, tidak mudah terprovokasi agar suasana yang harmonis dan menghindari perpecahan. "Apabila melihat, mengetahui, dan atau

menjadi korban kejahatan tersebut agar laporkan segera kepada aparat kepolisian terdekat" kata Kapolresta Pontianak, Komber. Pol. Muharrom, yang diamini oleh Asy'ari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak juga menggalakkan komunikasi antarbudaya dengan memanfaatkan momentum titik kulmunikasi, yaitu yang jatuh pada tanggal 21-23 April dan 21-23 September. Pada titik kulminasi ini senantiasa diselenggarakan gelar budaya dari berbagai macam etnis yang digelar di Tugu Katulistiwa. Demikian pula pada peringatan Hari Jadi Kota Pontianak, gelar budaya antaretnis senantiasa diselenggarakan. Pada momon ini semua jenis tarihan dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Melayu, dan Tionghoa mengekspresikan kesenian dan budaya mereka. Di Pontianak memiliki Tari Multietnis yang cukup populer di kalangan masyarakat dan senantiasa ditampilkan dalam momen tersebut. "Tarian ini memiliki makna simbolis akan pentingnya menjaga kerukunan antaretnik. Meskipun ada perbedaan, tetapi tetap bersatu dalam hubungan yang harmonis dan kekeluargaan", kata Yuniarlita.

Kondisi sosial budaya yang plural itulah yang menurut para tokoh di Pontianak sepakat bahwa hanya Pancasila yang paling cocok dan efektif dalam mengatasi dan

menyatukan berbagai perbedaan. Secara politik, melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, sekarang juga sudah membuka etnis Tionghoa masuk ke dalam pemerintahan. "Sudah mulai banyak etnis keturunan Cina yang menjadi politisi, pegawai negeri, dan bahkan para perempuan Cina sudah banyak yang aktif dalam kegiatan PKK, Dharma Wanita, dan lain-lain", kata Yuniarlita.

Era reformasi memang membawa perubahan politik signifikan bagi etnis Dayak dan Tionghoa untuk memasuki ruang politik di Kalimantan Barat. Etnis Dayak maupun Tionghoa banyak yang masuk ke birokrasi pemerintahan, baik pejabat bereselon hingga bupati. bahkan Gubernur Kalimantan Barat sekarang, Cornelis, adalah orang Dayak asli. Sementara Wakil Gubernurnya, Christiandy Sanjaya adalah keturunan Cina. Sejarah orang Cina memang sudah cukup panjang keberadaannya di Kalimantan Barat, dan telah memberikan sumbangan tidak terhadap kemajuan di Kalbar. "Tidak benar jika orang Cina merupakan etnis yang eksklusif hanya mau tinggal di ruang tertentu sesama keturunan mereka", kata Yusriadi, wartawan Borne Tribune.

Sementara itu Dedy Ari Asfar, anggota Pusat Studi Bahasa dan Masyarakat Borneo, menjelaskan bahwa bahasa Cina telah banyak diserap dalam bahasa orang non Cina yang tinggal di Kalbar.

Bahasa memainkan peran penting bagaimana kontak budaya dan etnik terjadi pada masyarakat yang plural. "Kata pak yang kemudian dalam bahasa pergaulan sehari-hari menjadi ngepak (membungkus) adalah bahasa Cinan. Apalagi kata goceng (5 ribu), cepek (seratus) yang telah lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah bahasa Cina. Demikian pula dalam dunia kuliner, banyak sekali jenis makanan dari etnis Cina. Yang paling populer adalah tahu, merupakan makanan khas asli Cina yang sudah merakyat", jelasnya.

Namun demikian di mata orang kecil, teruma jika dikaitkan dengan isu ekonomi Pancasila belum berhasil diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang berpihak rakyat kecil. Sistem ekonomi Pancasila yang pro pada kepentingan ekonomi rakyat, masih belum dirasakan oleh rakyat kecil. Jamil misalnya, seorang sopir taxi ini berpendapat bahwa Pancasila itu hanya berhenti di pidato para pejabat saja. Memang kalau pidato katanya selalu ingin melaksanakan kebijakan yang mengangkat rakyat miskin, tetapi nyatanya tidak demikian. Menurut Jamil kondisi rakyat kecil sama saja, dalam arti cari uang sulit, barang-barang kebutuhan pokok terus naik, layanan kesehatan dan pendidikan juga tetap mahal dan hanya berpihak pada kelompok masyarakat kaya. "Pancasila itu hanya sering diucapkan dalam pidato saja, tetapi kenyataannya rakyat kecil

tetap tidak sejahtera", katanya.

Menyinggung masalah pembauran misalnya, di Pontianak belum tercermin secara konkret. Pembauran itu hanya di tingkat permukaan, tetapi secara substantif masih belum terwujud. "Orang Cina di sini kalau bersatu jika ada kepentingan ekonomi. Bahasa pergaulan mereka sehari-hari jika kumpul sesama etnis Cina juga memakai bahasa Cina, bukan bahasa Indonesia. Demikian pula orang Jawa kalau kumpul orang Jawa ya menggunakan bahasa Jawa", kata Jamil.

Aceh: Tetap Pancasila

Komitmen kepada NKRI pasca MOU perdamaian itu sudah harga mati, ini artinya penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup juga menjadi sebuah keniscayaan. Persoalan Pancasila sekarang ini dinilai kurang populer bukan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak populer, tetapi mungkin karena rakyat melihat tingkah dan prilaku elit (para pemimpinnya) kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Indikasi yang menonjol seperti kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dari pusat sampai ke daerah. Pada prinsipnya sistem politik yang berlaku saat ini baik dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. "Tetapi yang menjadi masalah adalah prilaku elit politik yang cenderung tidak mencerminkan pengamalan

nilai-nilai Pancasila. Komunikasi politik yang dipertontonkan seperti tidak beretika dan syarat dengan kepentingan kelompok. Sikap para pemimpin bangsa seperti itu pasti berpengaruh pada sikap masyarakat kita. Terlebih lagi kalau kita memposisikan nilai-nilai Pancasila itu berhimpit dengan nilai-nilai agama, maka terlihat komitmen para elit politik di negeri ini semakin jauh dari yang diharapkan", kata Kamaruddin Abubakar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Aceh.

Suara senada juga dikemukakan oleh Mawardi Adama, Sekretaris KNPI Wilayah Provinsi Aceh, yang mengatakan bahwa secara umum prilaku elite politik di negeri ini memang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Para elite politik di tingkat pusat maupun daerah kurang Pancasila. Indikatornya tampak pada banyaknya elite politik terkena kasus pidana. Sayangnya upaya penyelesaiannya sangat sarat dengan nuansa politik, sementara upaya melalui jalur hukum pun terkesan penuh rekayasa", ungkapinya. Lebih lanjut Mawardi menjelaskan bahwa situasinya menjadi lebih memprihatinkan ketika pengaruh global juga cukup dominan dalam pembentukan sikap dan prilaku masyarakat. Interfensi nilai-nilai dari luar melalui teknologi komunikasi dan lain-lain yang sangat canggih masuk sampai ke ranah privat, sehingga jangankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama pun

cenderung ditinggalkan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara serius akan merusak tatanan nilai yang dimiliki bangsa ini.

Sementara itu Gazali Syam, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh memberikan penilaian yang sama tentang kecenderungan perilaku elite politik sekarang ini. Pancasila sekarang kurang populer termasuk disebabkan karena dulu ketika masih ada P4 tetapi dalam praktek banyak penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, akibatnya Pancasila tidak digubris, termasuk akibat konflik Aceh. Kalau sistem politik sebenarnya sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dalam perilaku elit politik tidak mencerminkan Pancasila. Seperti dalam komunikasi politik yang mereka tampilkan sangat jauh dari etika dan moral jika diukur negan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan azas musyawarah sendiri masih perlu dipertanyakan apakah benar ada faktor keterwakilan, dan sangat tergantung pada faktor manusianya. Demikian juga banyak terjadi pelanggaran, tidak adanya keserasian antara perkataan dan perbuatan, termasuk di kalangan birokrasi.

Agak sedikit berbeda datang dari pendapat Muhiddin Saman, Kepala Bidang Pemantapan Ideologi Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh, yang mengatakan bahwa

meskipun harus diakui bahwa banyak elite politik yang mulai mengabaikan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi juga tidak sedikit elite yang perilakunya berada dalam koridor Pancasila. "Memang ada elite politik yang perilakunya kurang bagus, tetapi tidak sedikit yang konsisten berperilaku baik sesuai dengan Pancasila", katanya.

Terkait dengan persoalan hubungan antara agama dan negara, pada prinsipnya hampir semua informan sepakat bahwa agama, dalam konteks ini adalah Islam, memberi spirit dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana diungkapkan oleh Muammar, Ketua LSM Komunitas Demokrasi Rakyat Aceh, bahwa Lebih cocok agama mengikuti negara, artinya sebaiknya agama punya posisi sebagai pemberi spirit dalam kehidupan negara yang berdasarkan Pancasila. Seharusnya dalam negara yang berfalsafah Pancasila apresiasi terhadap agama merupakan suatu kenicayaan. Artinya nilai-nilai agama harus menjadi pertimbangan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Aceh prinsip ini sudah mulai dilakukan. Seperti dalam mengangkat seorang pejabat muslim salah satu syaratnya bisa mengaji (membaca) Al-Quran. "Di Aceh tidak ada terorisme, sempat muncul sebentar tetapi kemudian dihilangkan. Bisa lebih ditegas lagi bahwa di Aceh sendiri tidak

ada keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam", ungkapnya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhiddin Saman, Pancasila sebagai dasar dan falsafah NKRI sudah final. Kalau saat ini terasa kurang populer, maka itu sebenarnya lebih disebabkan oleh karena kurang sosialisasi. Sebaiknya Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan agar lebih mengahyati sejak dini. Khusus di Aceh lebih disebabkan karena konflik yang berkepanjangan sehingga Pancasila tidak menjadi perhatian. Sementara itu Dr. Syarifuddin Hasyim Sh, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hubungan antara agama dan negara berdasarkan Pancasila seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara mengharuskan negara melindungi kebebasan beragama sekaligus menciptakan kerukunan antarumat beragama. "Hubungan ini perlu diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak terdapat konflik nilai dalam setiap kebijakan dan perilaku masyarakat", tegasnya.

Suara senada juga dikemukakan oleh Kammaruddin Abubakar, bahwa komitmen kepada NKRI pasca MOU perdamaian itu sudah harga mati, ini artinya penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup juga menjadi sebuah keniscayaan.

Meskipun harus diakui bahwa memang sempat muncul wacana dan gerakan yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi sebenarnya lebih merupakan reaksi atas ketidakpercayaan pada pemerintah, bukan karena Pancasila semakin tidak populer. "Komitmen rakyat Aceh pasca konflik, terhadap NKRI dan Pancasila tidak perlu diragukan", tegasnya. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila. Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Persoalannya adalah bagaimana mengelolanya agar sinkron dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Persoalan inkonsistensi antara rumusan luhur dalam Pancasila dengan implementasinya dalam tataran empirik, juga terlihat pada sistem ekonomi. Semua informan berpendapat senada, sistem ekonomi yang berspirit Pancasila adalah sosialis demokratis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan dengan pelaku utama koperasi sebagaimana diamanatkan Pancasila hanya bersifat teoretik, dan belum terimplementasi secara konkrit. "Seharusnya kalau memang mengikuti Pancasila, sistem ekonomi kita harusnya sosialis, tetapi faktanya sangat liberal kapitalistik", kata Mawardi Adama. "Sistem ekonomi kita kurang berpihak pada rakyat, masih menguntungkan pada segenap elite, sehingga kesenjangan

sosial ekonomi masih fenomenal. Jika ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, maka sistem ekonomi kerakyatan adalah keniscayaan", kata Syarfuddin Hasyim.

Sedangkan untuk lebih memopulerkan kembali Pancasila harus ada sosialisasi yang terus menerus seperti era Orde Baru. Semua informan berharap bahwa sosialisasi melalui pendidikan sekolah adalah mutlak. "Akan tetapi tidak cukup hanya melalui mata pelajaran PPKN, karena selama ini porsi pelajaran Pancasila terlalu sedikit dalam mata pelajaran tersebut. Perlu dipikirkan kembali bahwa mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila harus berdiri sendiri, tidak menjadi sub pokok bahasan dari mata pelajaran PPKN", kata Aswadi selaku Sekretaris Pelajar Islam Provinsi Aceh. Sementara itu baik Gazali Moh. Syam, Muhiddin Saman, Mawardi Adama, maupun Kamaruddin Abubakar sepakat bahwa untuk menggalakkan sosialisasi Pancasila, perlu dilaksanakan lagi model penataran P4 seperti era Orde Baru dulu. Hanya saja mereka berharap materinya diperbarui dan metode sosialisasinya yang diubah secara lebih dinamis dan demokratis, serta tidak bersifat indoktrinatif.

Madiun: Basis Nasionalis

Madiun merupakan kota yang memiliki sejarah menarik, khususnya pada awal-awal berdirinya Republik Indonesia. Sebut saja misalnya peristiwa pemberontakan partai komunis pimpinan Musa pada awal kemerdekaan yang menghendaki "republik Madiun" dengan menerapkan ajaran komunisme. Akan tetapi pemberontakan ini gagal dan kemudian dapat dikendalikan kembali oleh pemerintah pusat. Ketidakberhasilan Musa dalam mewujudkan cita-citanya itu membawa implikasi bagi masyarakat Madiun hingga sekarang untuk senantiasa keluar dari stigma sebagai daerah sarang komunisme. Memang dalam pergaulan sehari-hari hingga kini, setiap kali orang mendengar kota Madiun, di samping identik dengan nasi pecel yang sangat populer, tetapi orang segera mengidentikan sebagai daerah yang pernah menjadi basis pergerakan komunisme pimpinan Musa. Atau ketika orang mendengar kota Madiun orang langsung mengidentikan dengan pemberontakan PKI Madiun.

Suyadi misalnya seorang pegawai Pabrik Gula Rejo Agung Madiun, menjelaskan stigma sebagai daerah komunis memang masih meresahkan sebagian warga masyarakat Madiun. Padahal menurutnya tidak semua orang Madiun pro terhadap gerakan komunis. Di era Orde Baru daerah ini memang terasa dijadikan sebagai

daerah khusus, dalam arti yang perlu diawasi oleh pemerintah di bawah Presiden Soeharto. Di daerah Dungus misalnya, yang memang merupakan basis pergerakan komunis dibangun patung yang menandakan kekejaman komunis. Digambarkan bagaimana para pemberontak komunis menyiksa para guru agama Islam yang ditawan, dan di latar belakangnya digambarkan patung anak sekolah yang memandang ke depan. "Adanya patung di Dungus itu merupakan konstruksi pemerintah Orde Baru bahwa daerah Madiun ini pernah terjadi pemberontakan komunis yang dicitrakan sangat kejam", kata Sujito seorang aktivis LSM kelahiran Madiun.

Akan tetapi secara empirik Madiun sekarang sudah berubah. Gerakan-gerakan yang anti pemerintahan sudah tidak ada, dan bahkan daerah ini menjadi salah satu daerah basis kekuatan nasionalis yang sangat fanatik terhadap ideologi Pancasila. Pada awal tahun 1999 misalnya, lebih dari satu juta jiwa berkumpul di Madiun yang merupakan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pro Mega, menyambut kedatangan Megawati Soekarnoputri yang kemudian menjadi presiden pada tahun 2001. Basis kekuatan nasionalis ini memang berakar pada kultur masyarakat madiun yang sebagian besar masih berkultur Islam *abangan*. Sebuah varian Islam yang masih terikat pada tradisi Jawa pedesaan, dan menjadi basis utama kekuatan

partai-partai nasionalis. Hampir setiap Pemilu di era reformasi, daerah Madiun senantiasa dikuasai oleh partai nasionalis yang sangat setia pada Ideologi Pancasila dan NKRI. "Dominasi partai nasionalis senantiasa mewarnai dalam setiap kali ada Pemilu. PDIP, Golkar, dan kemudian menyusul Partai Demokrat senantiasa menang mutlak di daerah ini", kata Heri Pratikno, salah seorang dosen ilmu sosial di Universitas Merdeka Madiun.

Memang di Madiun di beberapa wilayahnya ada yang menjadi basis kuat Nahdlatul Ulama, seperti di kecamatan Dolopo yang berbatasan dengan Ponorogo. Di daerah ini PKB senantiasa mendominasi dalam setiap kali Pemilu. Akan tetapi PKB merupakan partai berbasis massa Islam tradisional yang berideologi Pancasila. "Hubungan antara negara dan agama bagi PKB sudah jelas, yaitu Indonesia bukan negara Islam. Agama Islam akan menjadi spirit dalam pengelolaan negara. PKB pun dengan jelas berasaskan Pancasila", kata pengamat politik Tadjoe Rizal yang rajin meneliti masyarakat nahdliyin.

Akan tetapi juga harus diakui bahwa di Madiun yang memiliki kultur abangan itu adakalanya justru menjadi pengikut Islam yang puritan. Di Madiun pernah beberapa kali ditemukan anggota gerakan Islam puritan yang terlibat aksi terorisme. Sekarang pun gerakan Islamisasi

juga sangat terasa menguat di wilayah ini, terutama aliran yang fundamentalisme. "Memang, mereka yang berkultur abangan akan dengan cepat mengalami transformasi ke Islam radikal, terutama jika berkelindan dengan isu kemiskinan. Orang abangan merupakan kelas bawah yang miskin dan berada di daerah pedesaan. Kondisi miskin itu menjadi rentan terhadap pengaruh gerakan ideologi baik itu kiri maupun sekarang adalah gerakan kanan yang berbasis agama yang memilih strategi pergerakan secara radikal", kata Abdul Hamid, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang pernah meneliti masyarakat Madiun.

Orang Madiun sendiri menyebut orang abangan yang tiba-tiba menjadi sangat Islam fanatik itu sebagai orang santri dadakan yang Islamnya *kenceng* (kuat). "Memang mereka itu semakin sering terlihat di berbagai jalan di Madiun, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Madiun bagaimanapun tetap nasionalis, dan sangat setia pada Pancasila. Bahkan orang Madiun umumnya siap berjuang demi tegaknya Pancasila dan NKRI. Siapa pun yang akan mengubah ideologi Pancasila, pasti tidak akan mendapat dukungan signifikan warga Madiun", kata Suyadi.

Memang ketebalan rasa nasionalisme dan fanatisme terhadap Pancasila serta tegaknya NKRI,

boleh jadi tidak terlepas dari bahwa Madiun juga menjadi pusat Militer. Pangkalan Angkatan Udara, yaitu Lanud Iswahyudi adalah merupakan pangkalan udaran utama jajaran TNI. Berbagai pesawat tempur canggih ada di Madiun. Di Madiun juga banyak bataliyon Angkatan Darat, seperti Bataliyon 501 di Jiwan misalnya, adalah salah satu contoh bahwa Madiun merupakan kota Militer. Barak-barak militer dari berbagai angkatan cukup banyak di kota ini. Oleh karena itu sangat wajar jika masyarakat warga Madiun memiliki jiwa nasionalisme dan kesetiaan tinggi terhadap ideologi Pancasila.

Penutup

Begitulah, dinamika politik dan kehidupan sosial di daerah menunjukkan adanya kecenderungan yang menarik jika dikaitkan dengan isu ideologi Pancasila. Wacana tentang Pancasila memang menunjukkan sedikit menyurut dan kurang populer di hampir semua daerah. Akan tetapi bahwa komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan tetap tinggi, dan bahkan itu juga terjadi di Aceh yang merupakan wilayah yang secara politik memiliki resistensi terhadap pemerintah pusat. Sementara itu komitmen akan tegaknya NKRI juga masih tetap tinggi, dan hampir semua sepakat bahwa tegaknya NKRI memang berkorelasi secara signifikan dengan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Tesis yang bisa diajukan adalah, bahwa NKRI sulit ditegakkan tanpa adanya consensus bersama dari berbagai kekuatan sosial politik akan setiap pada Pancasila.

Akan tetapi juga sepakat, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh berhenti pada tataran ide, tetapi harus dibumikan ke wilayah empirik. Artinya, Pancasila tidak bisa hanya sebagai slogan nasionalistik dalam pengertian emosional, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua sepakat bahwa perilaku elite politik hingga fase

perkembangannya sekarang masih belum menunjukkan keteladanan sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Diperlukan kesadaran bersama untuk tetap menjaga Pancasila dengan cara mewujudkannya pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semakin nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan dan tindakan nyata, maka semakin kuat eksistensi Pancasila. Bersamaan dengan itu semua juga sepakat bahwa hanya Pancasila lah yang paling pas sebagai ideologi yang memayungi Indonesia yang plural.

1. **Definisi**: Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) adalah ilmu kesehatan yang mempelajari kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

2. **Objek Kajian**: Objek kajian IKM adalah kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

3. **Aspek-aspek**: Aspek-aspek IKM meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

4. **Peran**: Peran IKM adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

5. **Kelebihan**: Kelebihan IKM adalah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

6. **Kekurangan**: Kekurangan IKM adalah sulit untuk diukur, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

1. **Definisi**: Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) adalah ilmu kesehatan yang mempelajari kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

2. **Objek Kajian**: Objek kajian IKM adalah kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

3. **Aspek-aspek**: Aspek-aspek IKM meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

4. **Peran**: Peran IKM adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

5. **Kelebihan**: Kelebihan IKM adalah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

6. **Kekurangan**: Kekurangan IKM adalah sulit untuk diukur, yaitu kesehatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang meliputi aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.